DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI RIAU

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Akhir ini merupakan upaya perencanaan kinerja dari tahapan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yang disusun melalui rangkaian mekanisme dan pembahasan, yaitu pembahasan ditingkat TAPD Provinsi yang dituangkan dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (FORUM-OPD) Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini belum secara sempurna terselesaikan seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang rencana kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2024.

Pada kesempatan ini disampaikan kepada seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini Saya ucapkan terima kasih. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah S.W.T dan dapat mewujudkan perencanaan yang baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU,

Drs. H. HELMI.D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP PROVINSI RIAU TAHUN 2020..... 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan capaian Renstra SKPD 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 23

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 25

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 35

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 38

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ... 39

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 39

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Provinsi Riau 45

3.3. Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi Riau 47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 54

BAB V PENUTUP 55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (T-C.29) 12
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Tabel 2.2 15
Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2022

Tabel 2.3 22
Pengukuran Kinerja DPMPTSP Tahun 2022

Tabel 2.4 (T-C.30)..... 24
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.5 26
Pemetaan Permasalahan

Tabel 2.6 (T-C.31) 37
Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Tabel 2.7 (T-C.33) 53
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan dokumen RKT memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja SKPD tahun sebelumnya dalam rangka pencapaian rencana strategis juga memperhatikan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya yaitu dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2024 dan dokumen Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kinerja dari tahapan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yang disusun melalui rangkaian mekanisme dan pembahasan, yaitu pembahasan ditingkat Provinsi pada Forum Gabungan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (FORUM-SKPD) untuk membahas rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 hingga pembahasan-pembahasan teknis yang dilakukan antara SKPD dengan TAPD untuk penajaman program dan kegiatan yang dianggap prioritas.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja Perangkat Daerah akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah/Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat enam (6) Tahapan utama dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah yakni: persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap penyusunan rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan tahap

penetapan Renja Perangkat Daerah, sedangkan tahapan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 melalui beberapa tahapan, yaitu: Penyusunan Rancangan Awal, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah terlihat seperti gambar berikut ini:

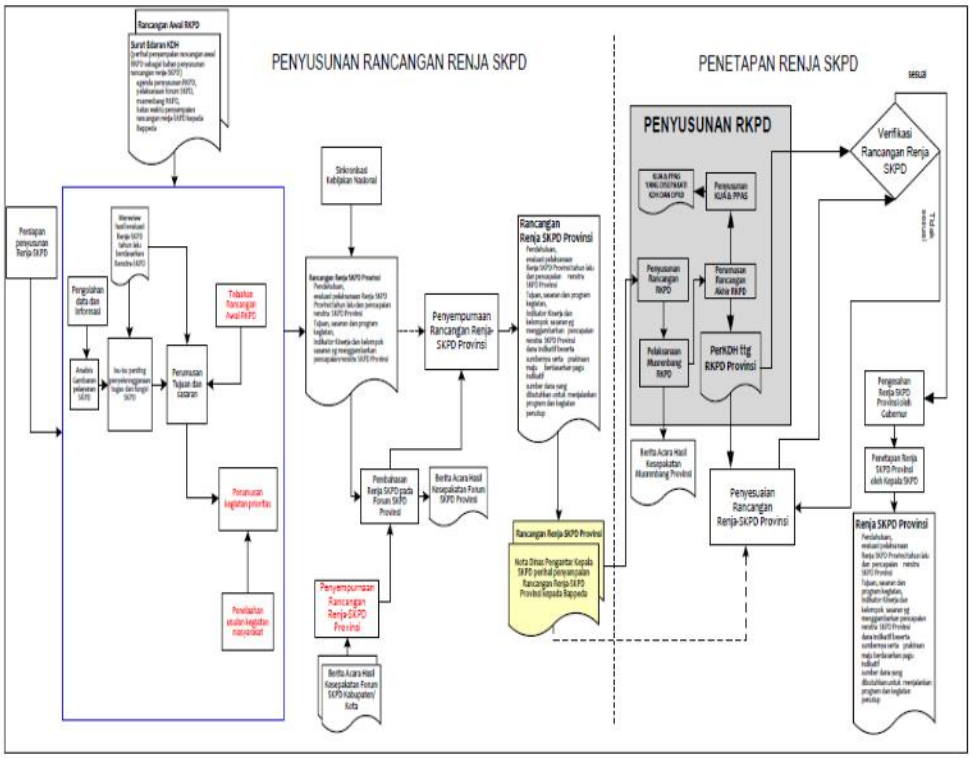

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, melakukan inventarisir permasalahan dari hasil evaluasi renja tahun sebelumnya (evaluasi renja tahun 2022 dan memperhatikan kondisi eksisting (renja 2023) serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat, dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Secara hierarki penyusunan rencana kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

1.2 DASAR HUKUM

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tenteng Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2O2O Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4) ;

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 53);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan tahun 2024.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 adalah untuk:

1. Membentuk kesepakatan bersama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mengenai kinerja yang ditargetkan untuk dicapai pada Tahun 2024.
2. Sebagai acuan dalam evaluasi kinerja dan dasar dalam pengukuran capaian kinerja Tahun 2024.
3. Sebagai acauan dalam penyususunan RKA tahun anggaran 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 dibagi dalam beberapa Bab dan lampiran. Uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut:

Bab I ***Pendahuluan***

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II ***Hasil Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022***

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2022

NO	KODE FIKASI	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019-2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2022		REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2022 (%)		KET
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		18
1	**2.18.01**	**Urusan SKPD**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana**	**100 Persen**	**11,548,053,086**	**Persen**			**3,369,371,646**		**1,211,673,467**		**3,142,482,395**		**93.27**	
	2.18.01.1.02		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 Persen**	**265,650,997**	**Persen**			**87,600,000**		**-**		**87,286,100**		**99.64**	
	2.18.01.1.02.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	265,650,997	0 Paket	0	1 Paket	87,600,000	0	-	1	87,286,100	100.00	99.64	
	2.18.01.1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**5,024,382,495**				**1,465,270,566**		**547,074,377**		**1,386,242,159**		**94.61**	
	2.18.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	2,027,431,577	10 Paket	415,692,100	10 Paket	350,005,759	4	119,078,656	10	317,749,216	100.00	90.78	
	2.18.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	733,559,785	1 Paket	689,429,000	1 Paket	200,000,000	1	87,806,000	1	154,214,000	100.00	77.11	
	2.18.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	500,942,802	1 Paket	377,444,950	1 Paket	99,659,807	0	-	1	98,838,300	100.00	99.18	
	2.18.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1,762,448,331	1 Laporan	702,537,116	1 Laporan	815,605,000	1	340,189,721	1	815,440,643	100.00	99.98	
	2.18.01.1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**4,851,203,486**				**1,319,311,080**		**385,042,765**		**1,189,593,391**		**90.17**	
	2.18.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	81,990,000	1 Laporan	19,362,960	1 Laporan	20,000,000	1	493,500	1	16,424,409	100.00	82.12	
	2.18.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	186,633,304	1 Laporan	54,325,220	1 Laporan	44,279,800	1	4,560,058	1	15,085,754	100.00	34.07	Standar Harga melebihi nilai belanja dan akan disesuaikan degan standar

NO	KODE FIKASI	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019-2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2022		REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2022 (%)		KET
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		18
	2.18.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4,582,580,182	1 Laporan	1,115,572,663	1 Laporan	1,255,031,280	1	379,989,207	1	1,158,083,228	100.00	92.28	
	2.18.01.1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**1,406,816,108**				**497,190,000**		**279,556,325**		**479,360,745**		**96.41**	
	2.18.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	139,512,854	0 Unit	0	1 Unit	44,030,000	1	8,411,000	1	40,757,640	100.00	92.57	
	2.18.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	1,026,203,254	12 Unit	554,879,742	12 Unit	403,170,000	3	222,076,600	12	389,534,380	100.00	96.62	
	2.18.01.1.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	241,100,000	5 Unit	178,771,778	5 Unit	49,990,000	5	49,068,725	5	49,068,725	100.00	98.16	
														Rata-rata Capaian Kinerja	100.00	87.50	
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi	
2	**2.18.02**		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO**		**1,311,316,150**				**170,754,000**		**99,277,928.00**		**156,055,178**		**91.39**	
	2.18.02.1.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi Riau**		**1,311,316,150**				**170,754,000**		**99,277,928.00**		**156,055,178**		**91.39**	
	2.18.02.1.02.02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	4 Dokumen	1,311,316,150	1 Dokumen	808,568,100	1 Dokumen	170,754,000	1	99,277,928	1	156,055,178	100.00	91.39	
														Rata-rata Capaian Kinerja	100.00	91.39	
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
3	**2.18.03**		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Event yang dilaksanakan**		**3,320,366,994**		**133,380,043**		**1,403,661,838**		**768,329,297**		**1,029,322,451**		**73.33**	
	2.18.03.1.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Event yang terselenggara dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal**		**3,320,366,994**		**133,380,043**		**1,403,661,838**		**768,329,297**		**1,029,322,451**		**73.33**	

NO	KODE FIKASI	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019-2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2022		REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2022 (%)		KET
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		18
	2.18.03.1.01.01		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	12 Dokumen	1,385,573,110	3 Dokumen	133,380,043	3 Dokumen	581,737,390	2	237,394,535	3	377,977,165	100.00	64.97	IPRO-KIT masih dalam penyempurnaan hingga akhir Desember 2022 sehingga pelaksanaan paket meeting seminar IPRO-KIT dan cetak dokumen IPRO tidak dapat dilaksanakan
	2.18.03.1.01.02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	18 Dokumen	1,934,793,884	0 Dokumen	0	4 Dokumen	821,924,448	3	530,934,762	4	651,345,286	100.00	79.25	
												Rata-rata Capaian Kinerja			100.00	72.11	
												Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sedang	
4	**2.18.04**		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Peningkatan Pertumbuhan IKM**		**3,531,602,287**				**1,101,190,733**		**411,398,065**		**1,057,531,544**		**96.04**	
	2.18.04.1.01		**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan**		**280,998,648**				**17,496,000**		**13,997,100**		**13997100**		**80.00**	
	2.18.04.1.01.01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4, Aplikasi, 30000 Pelaku Usaha	280,998,648	4 Aplikasi	357,266,016	10000 Pelaku Usaha	17,496,000	######	13,997,100	10000	13,997,100	100.00	80.00	pada sub kegiatan ini, terdapat belanja pembelian lisense yang baru dilakukan akhir tahun dikarenakan paket lisense sebelumnya masih berlaku
	2.18.04.1.02		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Persentase Persyaratan dan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha**		**3,250,603,639**				**1,083,694,733**		**397,400,965**		**1,043,534,444**		**96.29**	

NO	KODE FIKASI	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019-2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2022		REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2022 (%)		KET
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		18
	2.18.04.1.02.02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	885 Kegiatan Usaha	2,448,517,598	250 Kegiatan Usaha	883,003,450	300 Kegiatan Usaha	888,300,000	120	343,919,750	421	886,457,250	100.00	99.79	
	2.18.04.1.02.03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	400 Orang	802,086,041	103 Orang	266,284,806	100 Orang	195,394,733	35	53,481,215	100	157,077,194	100.00	80.39	
														Rata-rata Capaian Kinerja	100.00	86.73	
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi	
5	**2.18.05**		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan**		**2,730,485,568**				**1,029,362,824**		**348,913,301**		**973,723,161**		**94.59**	
	2.18.05.1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal dari Pelaku Usaha**		**2,730,485,568**				**1,029,362,824**		**348,913,301**		**973,723,161**		**94.59**	
	2.18.05.1.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	88 Kegiatan Usaha	318,600,000	34 Kegiatan Usaha	79,241,250	2 Kegiatan Usaha	12,515,000		-	2	12,515,000	100.00	100.00	
	2.18.05.1.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1344 Pelaku Usaha	1,212,057,568	300 Pelaku Usaha	321,672,500	324 Pelaku Usaha	423,104,441	133	102,202,001	466	368,650,011	100.00	87.13	
	2.18.05.1.01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	135 Kegiatan Usaha	1,199,828,000	69 Kegiatan Usaha	340,890,022	69 Kegiatan Usaha	593,743,383	37	246,711,300	99	592,558,150	100.00	99.80	
														Rata-rata Capaian Kinerja	100.00	95.64	
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

NO	KODE FIKASI	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019-2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2022		REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2022 (%)		KET
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		18
6	**2.18.06**		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM**		**1,113,791,688**				**133,892,000**		**11,331,000**		**121,633,192**		**90.84**	
	2.18.06.1.01		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal**		**1,113,791,688**				**133,892,000**		**11,331,000**		**121,633,192**		**90.84**	
	2.18.06.1.01.01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	1,113,791,688	3 Dokumen	196,479,520	3 Dokumen	133,892,000	1	11,331,000	3	121,633,192	100.00	90.84	
Rata-rata Capaian Kinerja															100.00	90.84	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)															100.00	87.37	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM															Sangat Tinggi	Tinggi	

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

A. Pendapatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tidak memiliki anggaran pendapatan.

B. Belanja

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp. **25.898.369.656** (Dua puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **18.690.129.615** (Delapan belas milyar enam ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima belas), dan Belanja Langsung sebesar Rp. **7.208.233.041** (Tujuh milyar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh satu), dijabarkan dalam 6 Program, 11 Kegiatan dan 22 subkegiatan.

Pada tahun anggaran 2022 terdapat kegiatan yang tidak memenuhi target antara lain:

1. Program Promosi Penanaman Modal

   a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenagan Daerah Provinsi. Subbagian Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 64,97% dikarenakan IPRO-KIT masih dalam penyempurnaan hingga akhir Desember 2022 sehingga pelaksanaan paket meeting seminar IPRO-KIT dan cetak dokumen IPRO tidak dapat dilaksanakan.

Walaupun ada beberapa program/kegiatan yang tidak tercapai targetnya, namun tidak berdampak pada capaian indikator kinerja utama DPMPTSP. Dalam mengatasi hal tersebut, maka akan dilakukan upaya untuk penambahan target kinerja pada tahun yang akan datang untuk mencukupi target Renstra yang telah ditetapkan.

2.1.2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Dalam struktur keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan SKPD yang melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal, dan berdasarkan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau termasuk SKPD yang menjalankan Fungsi Ekonomi. Hasil kinerja program/kegiatan Rencana Kerja Tahun 2022 telah memenuhi target.

Adapun program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

1. Program Pengembanagan Iklim Penanaman sebagai berikut:
   a. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi (100%).
2. Program Pelayanan Penanaman Modal sebagai berikut:
   a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (80%)
   b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan nonpereizinan penanaman modal (99.79%).
   c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan (80.39%).

Dana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang dialokasikan pada ABPD Provinsi Riau Tahun 2022 mengalami APBD Perubahan dengan uraian serta realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
II.	BELANJA DAERAH	25.898.362.656	24.468.718.299	94,48%
1.	Belanja Tidak Langsung	18.690.129.615	17.987.970.378	89.90%
2.	Belanja Langsung	7.208.233.041	6.480.747.921	90,00%
	a.Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	7.044.225.964	6.347.672.165	89.93%
	c. Belanja Modal	164.007.077	133.075.756	88.77%

Sumber: Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan DPMPTSP Provinsi Riau.

Anggaran Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk membiayai Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 18.690.129.615,00- terealisasi sebesar Rp. 17.987.970.378, 00,- atau 96.24 persen.

Anggaran Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp. 7.208.233.041,00 terealisasi sebesar Rp 6.480.747.921,00 atau 90.00 persen digunakan untuk melaksanakan 6 Program, 11 Kegiatan dan 22 subkegiatan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan APBD Provinsi Riau dan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022 melalui kegiatan-kegiatan yang uraiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah ini adalah sebagai berikut:

Sub Kegiatan:

a. **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 87.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.87.286.100,- Melalui kegiatan ini telah tersedianya pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah ini adalah sebagai berikut:

Sub Kegiatan:

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 87.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.87.286.100,- Melalui kegiatan ini telah tersedianya pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 350.005.759,- dan terealisasi sebesar Rp.317.749.216,- Melalui kegiatan ini telah tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan keperluan kantor selama 1 tahun.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.154.214.000,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya makan dan minum keperluan kantor selama 1 tahun.

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.99.659.807,- dan terealisasi sebesar Rp.98.838.300,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.815.605.000,- dan terealisasi sebesar Rp.815.440.643. Melalui kegiatan ini menunjang keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun.

2. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.424.409. Melalui kegiatan ini telah tersedianya surat menyurat untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.44.279.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.085.754,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya fasilitas kantor dan sarana komunikasi informasi berupa langganan telepon dan operasional website/internet pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.255.031.280,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.158.083.228,- Melalui kegiatan ini telah tersedianya Jasa Administrasi Kantor selama 1 tahun.

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.44.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp.40.757.640,-.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.403.170.000,- dan terealisasi sebesar Rp.389.534.380,-.

b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.49.990.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.068.725,- .

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program pengembangan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.170.754.000,- dan terealisasi sebesar Rp 156.055.178,-. Melalui kegiatan ini tersedianya peta potensi dan peluang usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022.

C. Program Promosi Penanaman Modal

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal kewenangan provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.581.737.390,- dan terealisasi sebesar Rp.377.977.165,-. Melalui kegiatan ini penyusunan strategi promosi PM Provinsi Riau Tahun 2022.

b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.821.924.448,- dan terealisasi sebesar Rp.651.345.286,-. Melalui kegiatan ini terukurnya mutu pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022.

D. Program Pelayanan Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Pelayanan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota

a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.17.496.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.997.100,-. Melalui kegiatan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kab/kota Provinsi Riau Tahun 2022.

b. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.888.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.886.457.250,-. Melalui kegiatan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kab/kota Provinsi Riau Tahun 2022.

c. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.195.394.733,- dan terealisasi sebesar Rp.157.077.194.,-. Melalui kegiatan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kab/kota Provinsi Riau Tahun 2022.

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.515.000,- dan terealisasi sebesar Rp.12.515.000.,- . Melalui kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi Tahun 2022.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 423.104.441,- terealisasi sebesar Rp. 368.650.011,. Melalui kegiatan ini terlaksannya Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi tahun 2022.

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 593.743.383,- terealisasi sebesar Rp. 592.558.150,-

F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 133.892.000,- terealisasi sebesar Rp. 121.633.192,. Melalui kegiatan ini terlaksannya Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi pada tahun 2022.

2.1.3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan. Capaian IKU melebihi target antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat target 99,48 dan realisasi 99,48 (100%) realisasi Investasi dengan target 50 T dan realisasi 82.51 T (155.21 %).

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi Investasi PMA / PMDN	PMA /PMDN (Triliun RP) 50	PMA/PMDN (Triliun/ Rp) 82.51	155.21
2	Optimalisasi Penyelenggaraa n PTSP	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPMPTSP Provinsi Riau	Nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat = 99.48	Nilai Interval konversi indeks kepuasan masyarakat sampai dengan Desember 2022= 99.48	100

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Terdapat 2 subkegiatan yang tingkat capaian kinerja dan anggaran nya rendah, yaitu :

a. Sub kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan promosi pada Program Promosi Penanaman Modal yaitu realisasi anggaran hanya 64,97 persen karena dokumen IPRO yang disusun yaitu IPRO Kawasan Industri Tenayan (KIT) yang hingga Desember 2022 masih dalam tahap penyelesaian/penyempurnaan. Hal ini terjadi terkait dengan Dokumen terbaru Master Plan dan Feasibility Study (FS) sebagai dasar penyusunan IPRO yang juga masih dalam tahap penyelesaian oleh PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP);

b. Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi realisasi anggaran sebesar 79,25 % hal ini disebabkan oleh belanja perjalanan dinas yang tidak direalisasikan seluruhnya karena event promosi yang sebelumnya diagendakan akan diikuti di Provinsi Bali dialihkan ke Provinsi banten, sehingga terdapat selisih atau kelebihan nilai tiket pesawat yang cukup besar.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Provinsi Riau pada umumnya,
b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Provinsi Riau.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang antara para jabatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan;
b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja DPMPTSP Provinsi Riau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSP Provinsi Riau, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Penanaman Modal yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan

untuk mengukur kinerja atau keberhasilan DPMPTSP Provinsi Riau, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPMPTSP PRovinsi Riau kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) DPMPTSP Provinsi Riau, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024. Dalam analisis Kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, telah dijabarkan indikator Penetapan Kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2022.

2.2.1 Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja DPMPTSP Provinsi Riau yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2019–2024 dapat diuraikan dalam Tabel 2.4 (**Tabel T-C.30**) sebagai berikut:

Tabel 2.4 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana apratur			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Prosentase meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur pada Dinas PMPTSP Provinsi Riau			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN			49,67 T	49 T	50 T	51 T	52 T	24.8 T	82.5 T	51 T	52 T	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat			99.43	99.45	99.48	99.5	99.50	99.92	99.48	99.50	99.52	

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan komitmen Kepala Negara dalam rangka mencegah korupsi dan menyajikan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan murah.

Permasalahan dan hambatan DPMPTSP Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
b. Belum optimalnya sinergitas, integrasi, dan koordinasi
c. penyelenggaraan pelayanan perizinan;
d. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service;
e. Terhambatnya investasi karena tersedianya lahan untuk industri yang terkendala oleh Tata Ruang dan keterbatasan infrastruktur pendukung;
f. Belum optimalnya pencatatan investasi berbasis LKPM;
g. Belum optimalnya pemanfaatan media promosi untuk menarik minat investasi;
h. Masih terbatasnya data informasi mengenai peluang usaha/sektor/bidang usaha unggulan kabupaten/kota.

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya realisasi penanaman modal.	Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan penanam modal
		Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan.	Sistem belum sempurna
		Belum optimalnya kuantitas promosi penanaman modal	Keterbatasan penganggaran dan SDM
		Belum optimalnya kemitraan usaha antara PMA/PMDN dengan UKM	Kriteria dan persyaratan kemitraan belum sesuai dengan peraturan Penanaman Modal
		Sengketa pra perizinan	Terjadinya sengketa terkait kepemilikan lahan, tumpang tindih kepemilikan izin
		Regulasi yang sering berubah dan atau tumpang tindih	Ketidakpastian Pemerintah Pusat terkait Regulasi Perizinan.
			Masih adanya regulasi yang kurang sinergi antar sektor/K/L

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Persebaran Penanaman Modal belum merata	Perencanaan Penanaman Modal kurang optimal	Penguasaan informasi potensi dan wilayah pengembangan industri dan pertanian belum terintegrasi
			Sumber informasi masih terpencar
		Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial	Data pendukung promosi belum memadai
			Kompetensi SDM masih kurang dalam penguasaan Bahasa asing, media, dan fasilitasi pendampingan investor
		Banyak potensi kawasan industri baru dan potensi pertanian belum teridentifikasi	Data potensi belum lengkap
			Riset mengenai potensi investasi belum memadai dan belum terintegrasi antar OPD
		Belum optimalnya publikasi melalui media sosial.	Materi dan design promosi belum memadai

Isu-isu penting yang menjadi catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yaitu :

1. Belum optimalnya realisasi penanaman modal, mengacu pada kenyataan bahwa investasi atau penanaman modal oleh para pelaku usaha atau investor belum mencapai tingkat efisiensi atau keberhasilan yang diharapkan. Hal ini bisa mencakup beberapa aspek yang menyebabkan realisasi penanaman modal belum optimal, seperti:
   a. Regulasi dan kebijakan: Birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum, dan peraturan yang tidak jelas dapat menjadi hambatan bagi investor untuk berinvestasi atau memperluas usaha mereka.
   b. Infrastruktur: Ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai, seperti jaringan transportasi yang buruk, akses terbatas terhadap energi dan air bersih, atau konektivitas internet yang lemah, dapat menghambat daya tarik suatu wilayah untuk investasi.
   c. Korupsi: Tingkat korupsi yang tinggi dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap pemerintah dan berdampak negatif pada iklim investasi.
   d. Kualitas tenaga kerja: Kurangnya keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri dapat menghalangi pertumbuhan sektor-sektor tertentu dan membuat investor enggan untuk berinvestasi.
   e. Ketidakstabilan politik dan sosial: Lingkungan politik yang tidak stabil dan ketidakamanan sosial dapat membuat investor ragu-ragu untuk melakukan investasi jangka panjang.

f. Persaingan global: Persaingan dengan negara-negara lain yang menawarkan insentif dan fasilitas yang lebih menguntungkan bagi investor dapat menyebabkan aliran modal keluar dari suatu negara.

Untuk meningkatkan realisasi penanaman modal, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu mengatasi masalah-masalah ini dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Upaya seperti penyederhanaan regulasi, investasi dalam infrastruktur, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, serta menjaga stabilitas politik dan sosial, semuanya dapat membantu meningkatkan daya tarik suatu negara bagi para investor.

2. Persebaran Penanaman Modal belum merata, pernyataan tersebut menggambarkan masalah yang sering dihadapi dalam konteks ekonomi suatu negara atau wilayah. Ketika penanaman modal tidak merata, artinya investasi tidak didistribusikan secara seimbang di berbagai sektor ekonomi dan wilayah geografis. Beberapa penyebab dari ketidakmerataan penanaman modal antara lain:
   a. Infrastruktur yang tidak merata: Ketidakadilan dalam pembangunan infrastruktur antar wilayah dapat membuat beberapa daerah lebih menarik bagi investor dibandingkan dengan wilayah lainnya. Wilayah yang memiliki infrastruktur yang baik, seperti akses transportasi yang lancar dan ketersediaan fasilitas pendukung lainnya, cenderung lebih menarik bagi investasi.
   b. Kebijakan dan insentif yang berbeda: Ketika pemerintah memberikan insentif atau kebijakan khusus untuk menarik investasi, hal tersebut mungkin hanya berlaku

di beberapa wilayah tertentu, sehingga menyebabkan ketidakmerataan dalam penarikan modal.

c. Fokus sektor yang tidak merata: Beberapa sektor ekonomi mungkin mendapatkan lebih banyak perhatian dan dukungan dari pemerintah atau memiliki daya tarik yang lebih besar bagi investor, sehingga investasi cenderung terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu saja.
d. Perbedaan potensi ekonomi: Wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang lebih besar dan beragam cenderung menarik lebih banyak investasi dibandingkan dengan wilayah yang potensinya lebih terbatas.
e. Faktor sosial dan politik: Ketidakstabilan politik atau sosial di suatu wilayah dapat menyebabkan investor enggan untuk berinvestasi di sana, sehingga mempengaruhi persebaran penanaman modal.
f. Untuk mengatasi masalah ketidakmerataan penanaman modal, langkah-langkah berikut dapat diambil:
g. Pembangunan infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal dapat membuka akses ke pasar baru dan menciptakan peluang investasi baru.
h. Kebijakan yang inklusif: Pemerintah harus menciptakan kebijakan dan insentif yang merata untuk mendorong investasi di berbagai sektor dan wilayah, bukan hanya terfokus pada beberapa sektor atau wilayah saja.
i. Diversifikasi ekonomi: Mendorong diversifikasi ekonomi di berbagai wilayah dapat mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan peluang investasi di sektor lain.
j. Pendidikan dan pelatihan: Meningkatkan kualitas tenaga kerja di wilayah tertentu melalui pendidikan dan pelatihan dapat membuat wilayah tersebut lebih menarik

Tabel 2.6 (Tabel T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**27,877,359,552.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**27,274,975,559.00**	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**27,877,359,552.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**27,274,975,559.00**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana**	**100%**	**24,092,877,552.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana**		**23,740,493,559.00**	
2	**18**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**100,000,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**		**48,033,648.00**	
2	**18**	**01**	**1**	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23,333,648.00	
2	**18**	**01**	**1**	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	24,700,000.00	
2	**18**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**115 Orang/Bulan**	**19,700,984,152.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**115 Orang/Bulan**	**19,700,984,152.00**	
2	**18**	**01**	**1**	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/Bulan	19,700,984,152.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/Bulan	19,700,984,152.00	
2	**18**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**70,000,000.00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**49,582,359.00**	
2	**18**	**01**	**1**	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	35,000,000.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	24,655,353.00	
2	**18**	**01**	**1**	07	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	35,000,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	24,927,006.00	
2	**18**	**01**	**1.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**250,000,000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**250,000,000.00**	
2	**18**	**01**	**1.1**	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	250,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	250,000,000.00	
2	**18**	**01**	**1.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1,950,000,000.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1,670,000,000.00**	
2	**18**	**01**	**1.1**	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	450,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	450,000,000.00	
2	**18**	**01**	**1.1**	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	180,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	180,000,000.00	
2	**18**	**01**	**1.1**	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	280,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200,000,000.00	
2	**18**	**01**	**1.1**	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Riau	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,040,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Riau	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	840,000,000.00	
2	**18**	**01**	**1.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1,453,323,400.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1,453,323,400.00**	
2	**18**	**01**	**1.1**	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15,000,000.00	
2	**18**	**01**	**1.1**	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	62,280,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	62,280,000.00	
2	**18**	**01**	**1.1**	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,376,043,400.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,376,043,400.00	
2	**18**	**01**	**1.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**568,570,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**568,570,000.00**	
2	**18**	**01**	**1.1**	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44,030,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44,030,000.00	

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	18	01	1.1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	425,990,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	425,990,000.00	
2	18	01	1.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	98,550,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	98,550,000.00	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		**Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO**	**1 Dokumen**	**150,000,000.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		**Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO**	**1 Dokumen**	**130,000,000.00**	
2	**18**	**02**	**1**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**		**Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi**	**1 Dokumen**	**150,000,000.00**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**		**Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi**	**1 Dokumen**	**130,000,000.00**	
2	18	02	1	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	150,000,000.00	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	130,000,000.00	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		**Jumlah Event yang dilaksanakan**	**1 Dokumen**	**830,000,000.00**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		**Jumlah Event yang dilaksanakan**	**1 Dokumen**	**630,000,000.00**	
2	**18**	**03**	**1**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**		**Jumlah Event yang terselenggara dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal**	**4 Event**	**830,000,000.00**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**		**Jumlah Event yang terselenggara dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal**	**4 Event**	**630,000,000.00**	
2	18	03	1	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	5 Dokumen	830,000,000.00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	5 Dokumen	630,000,000.00	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**Peningkatan Pertumbuhan IKM**	**0,02**	**1,420,000,000.00**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**Peningkatan Pertumbuhan IKM**	**0,02**	**1,390,000,000.00**	
2	**18**	**04**	**1**		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**		**Persentase Persyaratan dan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha**	**100%**	**1,420,000,000.00**	**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**		**Persentase Persyaratan dan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha**	**100%**	**1,390,000,000.00**	
2	18	04	1	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Provinsi Riau	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	300 Kegiatan Usaha	1,100,000,000.00	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Provinsi Riau	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	300 Kegiatan Usaha	1,100,000,000.00	
2	18	04	1	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	100 Orang	320,000,000.00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	100 Orang	290,000,000.00	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan**	**52 T**	**1,249,482,000.00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan**	**52 T**	**1,249,482,000.00**	
2	**18**	**05**	**1**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**		**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal dari Pelaku Usaha**	**100%**	**1,249,482,000.00**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**		**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal dari Pelaku Usaha**	**100%**	**1,249,482,000.00**	
2	18	05	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Riau	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Kegiatan Usaha	79,650,000.00	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Provinsi Riau	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Kegiatan Usaha	79,650,000.00	
2	18	05	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Riau	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	360 Pelaku Usaha	323,268,000.00	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Provinsi Riau	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	360 Pelaku Usaha	323,268,000.00	
2	18	05	1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Riau	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasai	65 Kegiatan usaha	846,564,000.00	Pengawasan Penanaman Modal	Provinsi Riau	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasai	65 Kegiatan usaha	846,564,000.00	

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		**Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPMan**	**65 Persen**	**135,000,000.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		**Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPMan**	**65 Persen**	**135,000,000.00**	
2	**18**	**06**	**1**		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**		**Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal**	**100%**	**135,000,000.00**	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**		**Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal**	**100%**	**135,000,000.00**	
2	**18**	**06**	**1**	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Riau	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatka	1 Dokumen	135,000,000.00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Riau	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatka	1 Dokumen	135,000,000.00	
JUMLAH									**27,877,359,552.00**					**27,274,975,559.00**	

bagi investor yang membutuhkan tenaga kerja berkualitas.

k. Stabilitas politik dan sosial: Menciptakan lingkungan yang stabil dari segi politik dan sosial akan memberikan keyakinan kepada investor untuk berinvestasi di suatu wilayah.

Dengan upaya kolaboratif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan persebaran penanaman modal dapat menjadi lebih merata dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah.

Terkait dengan program tersebut terdapat dua Kementerian dan satu Lembaga Tinggi Negara yang terlibat secara langsung dalam tata kelola pelayanan yang disajikan oleh PTSP, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, yaitu:

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Visi Kementerian Dalam Negeri:

"Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipasif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berada pada Direktorat Pembangunan Daerah dengan Visi:

Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan daerah secara berkelanjutan"

Dengan strategi pencapaian program dalam koridor kebijakan strategik yaitu Mendorong Penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi. Bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dibutuhkan pelayanan publik yang dapat mendorong peningkatan investasi dalam rangka mendorong angka pertumbuhan ekonomi di daerah.

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Visi yang dirumuskan adalah:

"Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani"

Agar pencapaian dapat dilakukan secara maksimal maka ditetapkan sasaran strategis yang terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya dan yang menjadi indikator utamanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata nasional 92.

Peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui rencana aksi:

a. Peningkatan Pelayanan Perizinan :
   A.1. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan
   A.2. Penyederhanaan Deregulasi Perizinan
   - Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   - Pembatasan Waktu Pengurusan Izin

b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui :
   - Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (melalui implementasi UU tentang Pelayanan Publik dengan pembentukan perwakilan Komisi Ombudsman di daerah-daerah);
   - Peningkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda;
   - Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
   - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

3. **Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia**

Memiliki visi:

"Terwujudnya Iklim Penanaman Modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian Indonesia"

Pengembangan iklim penanaman modal dan iklim usaha yang kondusif menjadi salah satu prioritas dari sebelah prioritas nasional dibidang penanaman modal.

Dalam rencana strategis telah dituangkan bahwa iklim penanaman modal yang kondusif termasuk dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan didaerah dan telah dilimpahkan kepada daerah kewenangan perizinan penanaman modal melalui implementasi sistem PTSP didaerah dan diimbangi peningkatan sistem pelayanan dikantor BKPM. Hal ini menjadi prioritas dalam rangka koordinasi pelayanan penanaman modal ditingkat Pemeritah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kab/Kota.

Suatu perkembangan yang positif bagi BKPM adalah dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan Pepres ini, BKPM menyelenggarakan sistem PTSP di pusat dan utuk itu BKPM menerima pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dari Instansi terkait dan Pemerintah Daerah terkait penanaman modal yang menjadi urusan Pusat.

Disamping itu juga BKPM berwenang menetapkan standar, norma. Standar dan prosedur serta kelayakan operasi sistem PTSP yang dijalankan Pemerintah Daerah melalui implementasi sistem SPEPISE yakni sistem online palayanan perizinan penanaman modal.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau. Dalam rangka meningkatkan pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau mempunyai tantangan sebagai berikut :

a. Semakin meningkatnya peran nilai investasi dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau;
b. Semakin tingginya harapan peran investasi dalam memecahkan permasalahan pengangguran dan upaya pemerataan pembangunan nasional;
c. Semakin banyaknya perizinan yang menjadi kewenangan provinsi akibat berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Semaikin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik;
e. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

a. Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap penanaman modal;
b. Iklim usaha yang kondusif di Provinsi Riau memberikan peluang pada masuknya investasi;
c. Posisi geografis yang strategis dan terbangunnya infrastruktur transportasi nasional yang semakin baik;
d. Dukungan komitmen peningkatan pelayanan dari pimpinan daerah dan dukungan pemerintah pusat;
e. Struktur kelembagaan yang lebih kondusif dan akomodatif terhadap perkembangan perizinan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Rancangan awal RKPD Provinsi Riau tahun 2024 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman dan PTSP pada urusan pelayanan.

Review terhadap rancangan awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 berdasarkan arahan penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Belanja gaji tetap untuk 14 bulan dan TPP 11 bulan
2. Seluruh kegiatan di hotel agar ditiadakan, lebih mengutamakan pemanfaatan fasilitas gedung yang sudah ada, anggaran disesuaikan

3. Perjalanan dinas kegiatan dalam rangka identifikasi, inventarisasi, pemantauan dan sosialisasi ditiadakan.
4. Rasionalisasi belanja perjalanan dinas minimal 25 % dan
5. Rasionalisasi pagu kegiatan/belanja Penunjang 20 %.

Berdasarkan arahan tersebut diatas sehingga terjadi perubahan pagu pada rancangan akhir, dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari Rp. 50.000.000,- menjadi Rp 23.333.648,-.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari Rp. 50.000.000,- menjadi Rp 24.700.000,-.
3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dari Rp. 35.000.000,- menjadi Rp 24.655.353,-.
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dari Rp. 35.000.000,- menjadi Rp 24.927.006,-.
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari Rp 280.000.000,- menjadi Rp. 200.000.000,-.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari Rp. 1.040.000.000,- menjadi Rp. 840.000.000,-
7. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi dari Rp. 150.000.000,- menjadi 130.000.000,-.
8. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dari Rp. 830.000.000,- menjadi Rp. 630.000.000,-
9. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dari Rp. 320.000.000,- menjadi Rp. 290.000.000,-.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi maka pada Rancangan akhir RKPD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 juga terdapat 4 (empat) nama sub kegiatan yang berubah, yaitu:

1. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan menjadi Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal menjadi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal menjadi Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha;
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Pengawasan Penanaman Modal.

Agar lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.6 (**Tabel T-C.31**)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau didalam penyusunan Rencana Program dan kegiatan tahun 2024 tidak terdapat usulan aspirasi pemangku kepentingan dan kegiatan masyarakat, seperti unsur akademisi/perguruan tinggi, LSM dan Perangkat Daerah di Provinsi, seperti terdapat pada table T-C.32 berikut:

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2019-2024. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

VISI Pembangunan Nasional untuk tahun 2019-2024 adalah:

" Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)"

Visi Riau untuk pembangunan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2024 memiliki makna berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul dengan penjelasan sebagai berikut:

Berdaya Saing	– Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) – Meningkatkan Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar – Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan kemandirian daerah Usulan : Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal.

Sejahtera	– Mengurangi ketimpangan sosial – Menanggulangi kemiskinan – Menurunkan tingkat pengangguran Usulan : Kondisi kemakmuran masyarkat riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.
Bermartabat	– Meningkatkan kehidupan beragama – Melestarikan adat istiadat – Mengembangan nilai sosial dan budaya Usulan : Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama sertapenerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.
Unggul	– Prestasi di bidang seni, budaya dan agama – Prestasi di bidang olahraga – Terbaik dan terdepan dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan – Terobosan dan inovasi daaerah Usulan : Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanaan publik dan penyelenggaraan pemerintahan

Visi ini diwujudkan melalui 5 (lima) MISI PEMBANGUNAN, yaitu:

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.

Usulan :

Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing

Misi 2: Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi 3: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.

Misi 4: Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.

Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara.
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK

1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global.
2. Menguatkan sistem pertahanan negara.
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara.
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi.
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda.
8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa.
9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan.
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan.
12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI

1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM.
2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.
4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham untuk masyarakat lokal/sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaan buruh.
6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional.

7. Penguatan investasi domestik.
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.
9. Membangun infrastruktur.
10. Membangun ekonomi maritim.
11. Penguatan sektor kehutanan.
12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan.
14. Membangun karakter dan potensi wisata.
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.
16. Pengembangan industri manufaktur.

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN

1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial.
3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga.

Pokok – pokok Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Perpajakan

- Meningkatkan *tax ratio* menjadi sekitar 14% (termasuk SDA migas dan pertambangan).
- Meningkatkan kepatuhan WP melalui *law enforcement* (pemeriksaan dan penyidikan).
- Memperluas *tax base.*
- Pengajuan usul barang kena cukai baru.

PNBP

- Mengoptimalkan penerimaan SDA migas
- menahan turunnya lifting
- pengawasan SDA pertambangan, kehutanan dan Perikanan

- Optimalisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN agar dapat mendorong peran BUMN sebagai *agent of development.*
- Memperbaiki peraturan perundang-undangan di bidang PNBP (mekanisme dan tarif).

Subsidi Energi

- Memberikan subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar.
- Penerapan *tariff adjusment* untuk TTL.
- Perbaikan bauran energi input untuk pembangkit listik.

Subsidi Non Energi

- Menyediakan Raskin kepada RTS selama 12 bulan sebesar 15 kg/RTS/bulan dengan harga jual Rp1.600/kg.
- Memenuhi kebutuhan pupuk dan benih petani dengan harga terjangkau dalam meningkatkan produksi pertanian.

Transfer ke Daerah

- Melanjutkan kebijakan affirmatif DAK yang diprioritaskan pada bidang infrastruktur dasar untuk Meningkatkan alokasi DAK.
- Penajaman bidang DAK sehingga lebih efektif, selektif dan optimal pemanfaatannya.

Dana Desa

- Meningkatkan alokasi Dana Desa 2016 sehingga setara 6 persen dari dan diluar transfer ke daerah.
- Mengefektifkan program-program yang berbasis desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Defisit dan Pembiayaan 2016
- Defisit diupayakan terus menurun, menjadi sekitar 1,7% - 1,9% terhadap PDB.
- *Primary balance* diupayakan untuk terus membaik, sehingga menuju positif di tahun 2019.
- Pengendalian rasio utang terhadap PDB.

- Mendukung program sejuta rumah bagi melalui alokasi dana bergulir untuk BLU PPP (FLPP).
- Melanjutkan pemberian beasiswa dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui program dana pengembangan pendidikan nasional.
- Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui pinjaminan pemerintah.
- Mendukung peran BUMN sebagai agen pembangunan.
- Mewujudkan peogram Prioritas Nasional (Nawacita) melalui alokasi PMN kepada BUMN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Instansi Pemerintah merupakan target indikator kinerja tingkat sasaran sratejik untuk masing-masing unit kerja. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukan kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan dinyatakan dalam angka capaian realisasi atas indikator-indikator kinerja yang berorientasi indikator kinerja sasaran untuk masing-masing unit kerja/instansi. Pencapaian angka-angka indikator kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan hasil pencapaian sasaran strategis.

Berdasarkan rumusan yang tertuang dalam Renstra, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah mengidentifikasikan sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2024 berdasarkan bidang kewenangan yang dimilikinya. Setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini dirumuskan dari dokumen perencanaan strategis. Sasaran strategis ini sebagaimana tertuang dalam Kerangka Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2024.

Adapun sasaran rencana kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan rumusan Rencana Strategis adalah :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan, dengan indikator capaian adalah:
   a. Angka Indeks Kepuasan Masyarakat, IKM = 99,52
   b. Rasio jumlah pengaduan yang masuk dan diselesaikan, 100%.
2. Meningkatnya kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menunjang percepatan investasi dan penanaman modal, dengan indikator :
   a. Jumlah perizinan dan non perizinan yang diproses,

b. Rasio jumlah perizinan dan non perizinan yang masuk dan diselesaikan sesuai standar, 100 %.

Untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2024 tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Subkegiatan. Program dan kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Riau Tahun 2024, dan merupakan bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk mengimplementasikan rencana strategis.

Uraian target sasaran program dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana tercantum pada formulir RKT pada lampiran tabel Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 terlampir.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berisikan tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program dan kegiatan dan pagu indikatif.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2024 yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan:

1. **Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**
   a. **Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah**

      Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 23.333.648,- Melalui kegiatan ini telah tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah

   b. **Evaluasi kinerja perangkat daerah**

      Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.24.7000.000,- Melalui kegiatan ini telah terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah.

2. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
   a. **Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang milik daerah SKPD**

      Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 24.655.353,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD.

   b. **Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD**

      Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 24.927.006,-. Melalui kegiatan ini telah terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD.

3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
   a. **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

      Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Melalui kegiatan ini telah terlaksananya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-. Melalui kegiatan ini telah Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.180.000.000,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya makanan dan Minuman yang disediakan sebanyak 1 paket.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Melalui kegiatan ini 1 paket yang disediakan untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 840.000.000,-. Melalui kegiatan ini untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah selama 1 tahun.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 15.000.000,-. Melalui kegiatan ini Jumlah Surat yang dikirim.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 62.280.000,-. Melalui kegiatan ini untuk

penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama 1 tahun.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.376.043.400,-. Melalui kegiatan ini untuk penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 1 tahun.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 44.030.000,-. Melalui kegiatan Tersedianya Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara selama 1 tahun.

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 425.990.000,-. Melalui kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Yang Dipelihara selama 1 tahun.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 98.550.000,-. Melalui kegiatan ini Tersediannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan:

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,-. Melalui kegiatan Tersedianya Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi Riau.

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Promosi Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.630.000.000,-. Melalui kegiatan ini Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenanangan Provinsi.

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Kegiatan:

1. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

a. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,-. Melalui kegiatan ini terwujudnya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

b. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.290.000.000,-. Melalui kegiatan ini terwujudnya Kegiatan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Periznan.

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Pengendalian Pelaksanann Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Kegiatan:

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 79.650.000,-. Melalui kegiatan ini Terjalinnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 323.268.000,-. Melalui kegiatan ini terwujudnya

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

c. **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 846.564.000,-. Melalui kegiatan ini terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Pengendalian Pelaksanann Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Kegiatan:

1. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 135.000.000,-. Melalui kegiatan ini terpenuhi kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.7 (Tabel T-C.33)**

TABEL 2.7 (TABEL T.C 33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PROVINSI RIAU

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR RKPD 2024			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**27,274,975,559.00**		
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**27,274,975,559.00**		**30,002,473,113.00**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana**		**100%**	**23,740,493,559.00**		**26,114,542,913.00**
2	**18**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**		**100%**	**48,033,648.00**		**52,837,012.00**
2	**18**	**01**	**1**	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	2 Dokumen	23,333,648.00	2 Dokumen	25,667,012.00
2	**18**	**01**	**1**	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	1 Laporan	24,700,000.00	1 Laporan	27,170,000.00
2	**18**	**01**	**1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**		**115 Orang/Bulan**	**19,700,984,152.00**	**115 Orang/Bulan**	**21,671,082,567.00**
2	**18**	**01**	**1**	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	115 Orang/Bulan	19,700,984,152.00	120 Orang/Bulan	21,671,082,567.00
2	**18**	**01**	**1**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah**		**100%**	**49,582,359.00**		**54,540,594.00**
2	**18**	**01**	**1**	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pekanbaru	2 Dokumen	24,655,353.00	2 Dokumen	27,120,888.00
2	**18**	**01**	**1**	07	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru	1 Laporan	24,927,006.00	1 Laporan	27,419,706.00
2	**18**	**01**	**1.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100%**	**250,000,000.00**		**275,000,000.00**
2	**18**	**01**	**1.1**	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekanbaru	1 Paket	250,000,000.00	1 Paket	275,000,000.00
2	**18**	**01**	**1.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100%**	**1,670,000,000.00**		**1,837,000,000.00**
2	**18**	**01**	**1.1**	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	10 Paket	450,000,000.00	10 Paket	495,000,000.00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR RKPD 2024			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*
2	**18**	**01**	**1.1**	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	180,000,000.00	1 Paket	198,000,000.00
2	**18**	**01**	**1.1**	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	200,000,000.00	1 Paket	220,000,000.00
2	**18**	**01**	**1.1**	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Riau	1 Laporan	840,000,000.00	1 Laporan	924,000,000.00
2	**18**	**01**	**1.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100%**	**1,453,323,400.00**		**1,598,655,740.00**
2	**18**	**01**	**1.1**	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	16,500,000.00
2	**18**	**01**	**1.1**	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Laporan	62,280,000.00	1 Laporan	68,508,000.00
2	**18**	**01**	**1.1**	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Laporan	1,376,043,400.00	1 Laporan	1,513,647,740.00
2	**18**	**01**	**1.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**100%**	**568,570,000.00**		**625,427,000.00**
2	**18**	**01**	**1.1**	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Pekanbaru	1 Unit	44,030,000.00	1 Unit	48,433,000.00
2	**18**	**01**	**1.1**	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru	12 Unit	425,990,000.00	12 Unit	468,589,000.00
2	**18**	**01**	**1.1**	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	5 Unit	98,550,000.00	5 Unit	108,405,000.00
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO**		**1 Dokumen**	**130,000,000.00**		**143,000,000.00**
2	**18**	**02**	**1**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi**		**1 Dokumen**	**130,000,000.00**		**143,000,000.00**
2	**18**	**02**	**1**	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	Provinsi Riau	1 Dokumen	130,000,000.00	1 Dokumen	143,000,000.00
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Event yang dilaksanakan**		**1 Dokumen**	**630,000,000.00**		**693,000,000.00**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR RKPD 2024			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*
2	**18**	**03**	**1**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Event yang terselenggara dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal**		**4 Event**	**630,000,000.00**		**693,000,000.00**
2	**18**	**03**	**1**	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Provinsi Riau	5 Dokumen	630,000,000.00	5 Dokumen	693,000,000.00
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Peningkatan Pertumbuhan IKM**		**0,02**	**1,390,000,000.00**		**1,529,000,000.00**
2	**18**	**04**	**1**		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Persentase Persyaratan dan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha**		**100%**	**1,390,000,000.00**		**1,529,000,000.00**
2	**18**	**04**	**1**	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	Provinsi Riau	300 Kegiatan Usaha	1,100,000,000.00	350 Kegiatan Usaha	1,210,000,000.00
2	**18**	**04**	**1**	03	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	Provinsi Riau	100 Orang	290,000,000.00	100 Orang	319,000,000.00
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan**		**52 T**	**1,249,482,000.00**		**1,374,430,200.00**
2	**18**	**05**	**1**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal dari Pelaku Usaha**		**100%**	**1,249,482,000.00**		**1,374,430,200.00**
2	**18**	**05**	**1**	01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Riau	10 Kegiatan Usaha	79,650,000.00	10 Kegiatan Usaha	87,615,000.00
2	**18**	**05**	**1**	02	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Riau	360 Pelaku Usaha	323,268,000.00	400 Pelaku Usaha	355,594,800.00
2	**18**	**05**	**1**	03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasai	Provinsi Riau	65 Kegiatan usaha	846,564,000.00	75 Kegiatan usaha	931,220,400.00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR RKPD 2024			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPMan**		**65 Persen**	**135,000,000.00**		**148,500,000.00**
2	**18**	**06**	**1**		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal**		**100%**	**135,000,000.00**		**148,500,000.00**
2	**18**	**06**	**1**	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Provinsi Riau	1 Dokumen	135,000,000.00	1 Dokumen	148,500,000.00
JUMLAH									**27,274,975,559.00**		**30,002,473,114.90**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Tahun 2024 terdiri dari 6 (Enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 24 (dua puluh empat) Subkegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.25.086.982.531,00 yang terdiri dari :

3.3.1.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 23.740.493.559,-

3.3.1.1.2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp. 130.000.000,-

3.3.1.1.3. Program Promosi Penanaman Modal Rp. 630.000.000,-

3.3.1.1.4. Program Pelayanan Penanaman Modal Rp. 1.390.000.000,-

3.3.1.1.5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Rp. 1.249.482.000,-

3.3.1.1.6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Rp. 135.000.000,-

BAB V

PENUTUP

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Provinsi Riau Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA Provinsi Riau Tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Rencana Kerja Provinsi Riau Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Rencana Kerja (RENJA)SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan Renstra Dinas).

Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.

3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024. Melalui dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini, diharapkan untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2024.

Pekanbaru, Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU,

Drs. H. HELMI.D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & Ii Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend Sudirman No.460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, Pekanbaru
Email : dpmptsp@riau.go.id
Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
Nomor : Kpts. 09 /DPMPTSP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

b. bahwa berdasarkan Pasal 125 sampai dengan Pasal 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah,perlu dibentuk Tim Penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan Perubahan Rencana KerjaPemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsii Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 TAHUN 2009 TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi RiauTahun 2019 Nomor 3);

10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 29/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. Melakukan Pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya.

b. Melakukan koordinasi dan penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan Dokumen Kebijakan Lainnya.

c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerahterkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya;

d. Menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023;

e. Melakukan analisis dan pengkajian hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya, untuk penentuan isu-isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;

f. Perumusan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai target kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;

g. Terlibat secara penuh dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 dan perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023.

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 dan perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2023 tepat waktu;

i. Melaporkan hasil kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal

Pekanbaru, 25 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU,

Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau

NOMOR : KPTS. 09 /DPMPTSP/2023

TANGGAL : 25 Januari 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2023

NO	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural/Fungsional
1	Ketua Tim	Drs. H. HELMI, M.Pd	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau
2	Sekretaris Tim	TENGKU FAZLY REDWAN, S.Sos, M.Si	Sekretaris
3	Sekretariat		
	- Koordinator	MUHAMMAD IQBAL, S.IP, M.Si	Perencana Ahli Muda
	- Anggota 1	MARLIA RAHMADONA, SE	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	- Anggota 2	DINA JULIANA, S.Si	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	- Anggota 3	ASRI NURYANI, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
4	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal		
	- Koordinator	ARSYAD, SE, M.Si	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
	- Anggota 1	RIDARSYAH ROSYA,S.Sos	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
	- Anggota 2	ANSHARI KADIR, S.Ag, M.Si	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
4	Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Perizinan Satu Pintu		
	- Koordinator	VERA ANGELIKA O.K, ST, MT	Penata Perizinan Ahli Madya
	- Anggota 1	ROHUL MAZIDAH H, S.Pi, M.Si	Penata Perizinan Ahli Madya
	- Anggota 2	TAUFIK HIDAYAT, S.STP	Penata Perizinan Ahli Madya
	- Anggota 3	SYILVAYANTI, SH, M.IP	Penata Perizinan Ahli Madya

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU,

Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau

NOMOR : KPTS. /DPMPTSP/2023

TANGGAL : Januari 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2023

NO	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural/Fungsional
1	Ketua Tim	Drs. H. HELMI, M.Pd	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau
2	Sekretaris Tim	TENGKU FAZLY REDWAN, S.Sos, M.Si	Sekretaris
3	Sekretariat		
	- Koordinator	MUHAMMAD IQBAL, S.IP, M.Si	Perencana Ahli Muda
	- Anggota 1	MARLIA RAHMADONA, SE	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	- Anggota 2	DINA JULIANA, S.Si	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	- Anggota 3	ASRI NURYANI, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
4	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal		
	- Koordinator	ARSYAD, SE, M.Si	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
	- Anggota 1	RIDARSYAH ROSYA,S.Sos	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
	- Anggota 2	ANSHARI KADIR, S.Ag, M.Si	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
4	Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Perizinan Satu Pintu		
	- Koordinator	VERA ANGELIKA O.K, ST, MT	Penata Perizinan Ahli Madya
	- Anggota 1	ROHUL MAZIDAH H, S.Pi, M.Si	Penata Perizinan Ahli Madya
	- Anggota 2	TAUFIK HIDAYAT, S.STP	Penata Perizinan Ahli Madya
	- Anggota 3	SYILVAYANTI, SH, M.IP	Penata Perizinan Ahli Madya

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU,

Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal

Pekanbaru, Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU,

Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

FORM VERIFIKASI DOKUMEN
RANCANGAN AKHIR RENJA PD TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
1	**COVER**	JUDUL COVER : **"RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2023 DINAS/BADAN……** (sesuai Perangkat daerah masing-masing)	√		
2	**PERGUB PENETAPAN**	Peraturan Gubernur Riau tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Riau Tahun 2023 yakni **Peraturan Gubernur Riau Nomor : 31 Tahun 2023, tanggal 24 Agustus 2023**		√	**Belum dimasukan**
3	**DAFTAR ISI**	Sesuai dengan Isi Renja Perangkat Daerah	√		
4	**DAFTAR TABEL**	Judul Tabel dan Halaman Tabel	√		
5	**BAB I PENDAHULUAN**				
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	√		
	1.2. Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.		√	**Peraturan Gubernur Riau Nomor : 31 Tahun 2023, tanggal 24 Agustus 2023**
	1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah	√		

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
	1.4. Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	√		
6	**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**				
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD	2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut Menggunakan **Tabel T-C.29**	√		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK Menggunakan **Tabel T-C.30**	√		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.	√		

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
	2.4. Review terhadap RKPD	Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan baru yang tidak terdapat pada RKPD, atau program dan kegiatan/sub kegiatan cocok namun besarannya berbeda; Menggunakan **Tabel T-C.31**	√		
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh. Misalnya melalui Forum SKPD atau kegiatan lainnya; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Menggunakan **Tabel T-C.32**	√		
7	**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**				
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	√		
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	√		
	3.3. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Menggunakan **Tabel T-C.33**	√		

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
8	**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**				
		Diambil dari SIPD Menu Laporan ==> Renja ==> Penetapan - Penetapan RKPD 2024.	√		
9	**BAB V PENUTUP**	1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3. Rencana tindak lanjut. **4.** Pada bagian lembar terakhir dicantumkan **tempat** dan **tanggal** dokumen, **nama Perangkat Daerah** dan **nama** dan **tanda tangan kepala Perangkat Daerah**, serta **cap** perangkat daerah yang bersangkutan.		√	**Belum di tanda tangani kepala OPD dan Cap**
10	**LAMPIRAN**	1. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 2. Hasil Verifikasi Dokumen Renja PD pada tahapan sebelumnya.		√	**SK Tim Penyusun Renja 2023 Belum ada**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Sekretaris

T. FAZLY REDWAN, S.Sos. M. Si.
NIP. 19730101 199903 1 007

Pekanbaru, September 2023

Verifikator :

1. ARIFAH AYUS, SP
NIP. 19721215 200701 2 003

2. HAFIF SALAM, SE
NIP. 19831121 201503 1 002